

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya segala bentuk usaha kecil maupun besar termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya UMKM yang terus berkembang atau berekspansi di Indonesia dan berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian negara (Kusuma dan Lutfiany, 2018).

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan tentunya perkembangan usaha kecil dan menengah di Surabaya semakin berkembang pesat seiring bertambahnya tahun. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya, jumlah UMKM di Surabaya meningkat sebanyak 40.000 dari tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Potensi UMKM (9,7 juta jiwa) di Jatim sangat luar biasa dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Jatim (Mubyarsah, 2021). Baik upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM maupun peningkatannya sangatlah penting. Salah satunya terletak di Surabaya, dimana Dinas Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya bertugas mengembangkan potensi UMKM yang ada untuk menjadi jembatan dalam memasarkan produk anggotanya agar mampu bersaing dengan produk lainnya di negara lain dengan ikut dalam pembinaan gratis yang disediakan oleh dinas terkait.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti: (1) kurangnya modal, (2) kesulitan pemasaran, (3) ketatnya persaingan antar perusahaan, (4) kesulitan bahan baku, (5) kurangnya teknis produksi keahlian, (6) kurangnya keterampilan manajemen, (7) kurangnya manajemen keuangan; (8) lingkungan bisnis yang kurang mendukung (perizinan, undang-undang dan peraturan). UMKM harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil untuk tumbuh menjadi pengusaha menengah dan kemampuan pengusaha mikro untuk tumbuh menjadi usaha kecil dan menengah. Namun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti: keterbatasan keterampilan, kompetensi, ahli dalam sesuatu, mengelola sumber daya manusia, informasi *marketing*, mencatat keuangan, dll (Bahri et al.2019). Menurut Hendrawati (2017), sebagian pemilik UKM berpendapat bahwa informasi akuntansi tidak penting, dan ketidakmampuan memanfaatkan informasi akuntansi menjadi penyebab utama kegagalan pengembangan usaha UMKM.

Modal terpenting bagi pembangunan ekonomi Indonesia pada kehadiran usaha kecil dan menengah yang handal dan kuat. Namun UMKM masih menghadapi banyak keterbatasan dan kendala, terutama kendala yang ada antara UMKM dengan perbankan sebagai penjual kredit kepada UMKM. Kelayakan usaha dan juga aspek keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia merupakan tantangan yang dihadapi UMKM oleh pihak Bank selama ini. Kurangnya kesamaan pemikiran mengenai persyaratan perbankan yang seharusnya dimiliki oleh UMKM seperti adanya laporan keuangan dan rencana bisnis (*business development plan*) menjadi kendala sehingga UMKM sulit mengakses pembiayaan. Padahal, laporan

keuangan sangat berguna bagi UMKM untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan ketika menjalankan usaha kecilnya (Mutiara dan Yudiantara, 2021).

Laporan keuangan yaitu suatu hal yang sangat diperlukan dalam usaha, kebermanfaatan laporan keuangan antara lain dapat mengetahui informasi tentang keadaan keuangan suatu entitas. Setiap hasil akhir untuk memutuskan sesuatu yang dilakukan oleh manajemen dalam pengembangan perusahaan tidak selalu berdasar pada *profit* melainkan pelaporan keuangan yang lengkap (Febriyanti & Wardhani, 2018). Standar EMKM diterbitkan dengan harapan agar UMKM mampu menerapkan akuntansi dengan menggunakan SAK EMKM sesuai standar yang sebelumnya dianggap rumit (SAK ETAP).

Upaya terpenting dalam pengelolaan kas adalah perlakuan akuntansi yang tepat. Dengan akuntansi yang baik, dalam persyaratan pengajuan pinjaman berupa laporan keuangan, evaluasi kinerja, pengetahuan situasi keuangan, perhitungan pajak, dan lain-lain harus dipenuhi oleh UMKM (Warsono et al. 2010). Masalah keuangan usaha kecil dan menengah sedikit berbeda dengan masalah keuangan perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya menggunakan basis akrual dalam pencatatan akuntansi, sedangkan bisnis kecil dan menengah biasanya menggunakan metode pencatatan pendapatan dan pengeluaran berbasis kas saat kas diterima atau dibayarkan.

Jika ingin membuat laporan keuangan dengan standar yang sesuai, maka perlu memperbaiki sistem internal perusahaan terlebih dahulu, karena sistem yang baik akan memudahkan penerapan. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK

EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2016, yang kemudian diubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 (IAI, 2016). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih mudah dipahami daripada SAK ETAP. SAK EMKM diterapkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)). Tujuannya adalah mencakup definisi dan kriteria mikro, usaha kecil dan menengah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Warsadi et al. 2017).

Dengan diterbitkannya standar ini, besar harapan agar UMKM dapat menerapkan standar akuntansi yang sesuai. Penggunaan SAK EMKM ditujukan bagi pengguna eksternal UMKM seperti pemilik dan kreditur yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Pemanfaatan laporan keuangan pada UMKM biasanya tidak memerlukan laporan keuangan yang rumit dan detail.

Menurut Susilowati et al (2021), terdapat hal-hal yang mempengaruhi pandangan penggerak ekonomi terhadap keutamaan pelaporan keuangan dalam pengembangan usaha, termasuk tingkat pendidikan tertinggi. Tingkat pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemajuan UMKM melalui pengelolaan pelaporan keuangan (Lohanda & Mustikawati, 2017). Tercapainya pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan kreasi baru dan inovatif, tetapi juga menghasilkan modal bagi pengelolaan dan pengembangan pegawai, kemampuan mengelola aktivitas kerja secara efisien, serta meningkatkan produktivitas kerja sehingga dampaknya juga

mempengaruhi prestasi kerja (Rostikawati dan Pimaningsih, 2019). Menurut Kholis (2014), semakin tinggi tingkat pendidikan pemangku kepentingan UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat penerapan pelaporan informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan adalah pemahaman akuntansi UMKM. Pengertian pemahaman akuntansi merupakan suatu hal untuk memahami ilmu akuntansi, termasuk proses pembukuan dan pelaporan keuangan, menurut atau mengacu pada prinsip dan standar akuntansi pelaporan keuangan yang berlaku saat ini. Menurut Auliah dan Kaukab (2019), supaya laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi standar diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Tentunya menurut Adryanta dan Rita (2020), untuk memahami bagaimana proses dan penerapan akuntansi perlu dipahami SAK EMKM beserta pedoman peraturan yang berlaku.

Pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi terlebih tentang pelaporan keuangan masih cenderung rendah di pemangku kepentingan UMKM. Oleh karena itu, pemangku kepentingan UMKM belum menyadari dan belum dapat dirasakan manfaatnya bagi pemangku kepentingan UMKM yang menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Sejak disahkannya kebijakan baru SAK EMKM, kegiatan sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh. Sosialisasi merupakan hasil proses perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang sehingga nantinya dapat berperan aktif di lingkungan masyarakat (Dewi et al. 2017).

Menurut Silvia dan Azmi (2019), sosialisasi SAK EMKM merupakan salah satu bentuk upaya yang perlu dilakukan IAI atau lembaga dalam konteks informasi yang ada tentang SAK EMKM agar dapat semakin meningkat. Sosialisasi menjadi sarana efektif untuk menginformasikan standar yang berlaku bagi pelaku UMKM.. Berdasarkan uraian di atas, maka SAK EMKM hendaknya dapat diterapkan secara optimal karena dengan diterbitkannya SAK EMKM diharapkan dapat mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Namun faktanya UMKM di Indonesia yang banyak yang belum memahami keberadaan SAK EMKM sehingga tidak mampu mengimplementasikannya secara maksimal. Banyaknya UMKM yang belum mengetahui SAK EMKM disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman SAK EMKM dan sosialisasi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiari & Yudiantara (2021) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian Larasati & Farida (2020) dan Febrianti & Wardhani (2018) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian Susilowati et al. (2021), Mutiari & Yudiantara (2021), Larasati & Farida (2021) dan Rahma Auliah & Kaukab (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun berbeda dengan

penelitian Adryanta & Rita (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian Andari et al (2022), Susilowati et al (2021) dan Mutiari & Yudiantara (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian Febriyanti & Wardhani (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK-EMKM.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
3. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan sosialisasi SAK EMKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan pembelajaran dalam pendidikan terkait mengenai pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan masukan kepada Dinas terkait untuk menyelenggarakan sosialisasi secara lebih intensif dan menyeluruh agar UMKM dapat menerapkan laporan keuangan sesuai standar EMKM.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk bahan pembelajaran di kampus atau di akademisi terkait pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaku UMKM mengenai laporan keuangan sehingga dapat memiliki pemahaman mengenai laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
- d. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama untuk yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan

sosialisasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar pemecahan masalah selama penyusunan skripsi, termasuk landasan teori, peneliti sebelumnya, hipotesis dan model analisis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis deskriptif, statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran.